

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

Andi Nurdin Rohaedi

Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi

&

Sabaruddinsah

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi

Abstract

This study aims to determine the effect of the financial statement presentation and accessibility of the financial statements on the use of local financial management information systems in the Department of Energy and Mineral Resources of West Java Province.

The method used is descriptive quantitative method with causality approach. The population in this study is the internal users of financial statements that direct employees with the preparation of financial statements in the Department of Energy and Mineral Resources (ESDM) of West Java Province. The sampling method use purposive sampling method with the number of respondents 60 people.

From the research it can be concluded that the financial statements do not affect the use of local financial management information system. Furthermore, the accessibility of the financial statements significantly influence the use of information systems in the area of financial management of the Department of Energy and Mineral Resources of West Java Province.

Keywords: *Financial statements, accessibility and financial information system users*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri dalam Bandariy, 2011). Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo dalam Bandariy, 2011).

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antar daerah. Pendanaan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif (Kawedar dalam Bandariy 2011).

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap biaya yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rohman dalam Bandariy, 2011). Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, dalam Bandariy 2011).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah (pusat dan daerah) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengguna laporan keuangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi laporan keuangan tersebut. Pemberlakuan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan penyampaian pertanggung jawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan menjadikan pemerintah harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan tersebut. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi beberapa pemerintah daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif kearah tersebut (Mulyana dalam Rohman, 2009).

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan memperluas responden yaitu pegawai yang berhubungan langsung dengan penyusunan dan penggunaan anggaran, yaitu setingkat KPA (kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara. hal inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya (Abdul Rohman, 2009; Safitri Amalia, 2009).

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi. Banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan. Oleh karena itu sangat

sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna (Sujana dalam Bandariy, 2011:16).

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan penggunaan yang diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pemda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

2.2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsive atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu: mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP, 2005).

Menurut Mardiasmo dalam Bandariy (2011) Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo dalam Bandariy, 2011).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *top secret*, *secret*, *confidential* dan *restricted*, dan *official secrets acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Mulyana dalam Bandariy, 2011).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Rohman dalam Bandariy, 2011).

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil feedback dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh signifikan penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

2.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoeer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana dalam Bandariy, 2011). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman dalam Bandariy, 2011).

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Pendekatan penelitian kausalitas menurut Arikunto (2002:10) bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian kausalitas ini, penulis dituntut untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sehingga diperoleh makna dan implikasi dari masalah yang diteliti.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey dengan mendistribusikan kuesioner kepada pengguna laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti membuat rumusan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian data akan didapat dari jawaban atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh responden terpilih. Metode ini dipilih oleh peneliti karena kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang digunakan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal laporan keuangan yaitu pegawai langsung dengan penyusunan dan penggunaan anggaran di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Responden Penelitian

No	Responden	Jumlah Responden	Responden yg Dapat di Olah
1	Kepala Dinas (PA)	1 orang	1 orang
2	Sekretaris Dinas (KPA)	1 orang	1 orang
3	Kepala Bidang (KPA)	10 orang	10 orang
4	Kepala seksi (PPTK)	33 orang	30 orang
5	Bendahara	22 orang	18 orang
	Jumlah	67 orang	60 orang

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

X₁ : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

a : Konstanta

b₁ : slope regresi atau koefisien regresi dari X₁

b₂ : slope regresi atau koefisien regresi dari X₂

e : kesalahan residual (error term)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17,0 dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

3.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis dilakukan dengan melihat tabel coefficients pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila $r \text{ value} < \alpha$ (0,05) sehingga menerima H_1 .
- 2) Tidak signifikan bila $r \text{ value} > \alpha$ (0,05) sehingga menolak H_1 .

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Nilai F)

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya.

Tabel 4.1
Hasil Uji F X_1 terhadap Y
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.811	2	31.906	7.741	.001 ^a
	Residual	234.922	57	4.121		
	Total	298.733	59			

a. Dependent Variable: Penggunaan_LK

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas_LK, Penyajian_LK

Sumber : Data primer diolah melalui SPSS, 2014.

Dari hasil output hasil uji statistik F yang terdapat dalam tabel 4.10, dapat diperoleh nilai probabilitas (F_{hitung}) sebesar 7.741 dan signifikan pada 0,001 dimana $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan laporan keuangan.

4.1.2 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4.2
Hasil Uji t X_1 terhadap Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.971	3.262		5.816	.000
	Penyajian_LK	.270	.139	.241	1.942	.057
	Aksesibilitas_LK	.289	.111	.324	2.608	.012

a. Dependent Variable: Penggunaan_LK

Sumber : Data primer diolah melalui SPSS, 2014.

Dari tabel 4.11 diatas nilai t (t_{hitung}) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} dilihat pada taraf signifikan 0,05 dimana $df = n - k - 1 = 60 - 2 - 1 = 57$. Oleh karena itu nilai t_{tabel} pada $df = 57$ adalah 1,67. Nilai t_{hitung} pada tabel diatas sebesar 1,942. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,942 > 1,67$) dengan nilai signifikan 0,057, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen penyajian laporan keuangan berpengaruh pada variabel dependen penggunaan laporan keuangan.

4.1.3 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik T menunjukkan apakah variabel independen (X_2) yang dimasukkan mempunyai pengaruh antara variabel independen terhadap dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji t X_2 terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.971	3.262		5.816	.000
Penyajian_LK	.270	.139	.241	1.942	.057
Aksesibilitas_LK	.289	.111	.324	2.608	.012

a. Dependent Variable: Penggunaan_LK

Sumber : Data primer diolah melalui SPSS, 2014.

Dari tabel 4.13 diatas nilai t (t_{hitung}) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} dilihat pada taraf signifikan 0,05 dimana $df = n - k - 1 = 60 - 2 - 1 = 57$. Oleh karena itu nilai t_{tabel} pada $df = 57$ adalah 1,67. Nilai t_{hitung} pada tabel diatas sebesar 2,608. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,608 > 1,67$) dengan nilai signifikan 0,012, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh pada variabel dependen penggunaan laporan keuangan.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirumuskan persamaan sistematisnya adalah sebagai berikut:

$$PSIPKD = 18,971 + 0,270PLKD + 0,289ALKD + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai 18,971 menunjukkan konstanta (a), dimana jika tidak ada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 18,971.
- koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) = 0,270, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) akan mendorong peningkatan penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,270 satuan dengan anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) adalah tetap/konstan.
- koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) = 0,289, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) akan mendorong peningkatan penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,289 satuan dengan anggapan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) adalah tetap/konstan.
- Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.11 diperoleh regresi variabel X_1 sebesar 0,270 dan nilai t_{hitung} 1.942 dengan nilai signifikan 0,057, dimana tingkat signifikan lebih dari 0,05 ($sig > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya peningkatan penyajian laporan keuangan daerah tidak berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2009), Safitri Amalia (2009) dimana penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan.

4.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.13 diperoleh regresi variabel X_2 sebesar 0,289 dan nilai t_{hitung} 2.608 dengan nilai signifikan 0,012, dimana tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($sig < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Mulyana (2006) dan Marjuki Sagala (2011) dimana aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil statistik menunjukkan nilai t_{tabel} sebesar 0,270 dan nilai t_{hitung} 1.942 dengan nilai signifikan 0,057, dimana tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($sig > 0,05$). Artinya penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2009), Safitri Amalia (2009) dimana penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan.
2. Hasil statistik menunjukkan nilai t_{tabel} sebesar 0,289 dan nilai t_{hitung} 2.608 dengan nilai signifikan 0,012, dimana tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($sig < 0,05$). Artinya aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Mulyana (2006) dan Marjuki Sagala (2011) dimana aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu kepada pihak terkait, diharapkan agar memberikan kemudahan untuk mengakses laporan keuangan oleh semua pihak yang berkepentingan, karena memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana dan pada akhirnya akan mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga *good governance dan clean government*.
2. Penelitian ini hanya meninjau penggunaan informasi keuangan daerah dari aspek laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan saja, untuk penelitian selanjutnya dapat pula ditambahkan atau diganti variabel lainnya yang mampu membuktikan praktik penggunaan informasi keuangan daerah dan perwujudan akuntabilitasnya oleh pemerintah daerah.

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian, tidak hanya pengguna internal akan tetapi juga pengguna eksternal, misalnya DPRD, LSM, pihak pers atau lembaga-lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anondo, Daru. 2004. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Tesis Program Pascasarjana UGM Yogyakarta*.
- Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK-RI). 2008. *LKPD di Seluruh Indonesia Buruk*, Jakarta.
- Belkaouli, Ahmed Riahi, 2001. *Teori Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta Financial Accounting Standard Board. (1978). *Statement of Cash Flows (SFAS no. 95)*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Tegal: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standard Board. 1998. *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba empat.
- Haryanto, sahmudin, dan Arifudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Tegal: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Henley D., et al. 1990. *Public Sector accounting and Financial Control 3rd ed*. London: Chapman and Hall.
- Hermalin, Benjamin and Michael. S Weisbach. 2007. *Transparency and Corporate Governance*. <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Jones, D. B. 1985. *The Needs of Governmental Financial Reports*. Government Accounting Standards Board.
- Kawedar, Warsito. Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi 26 Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Koestoer, Hendro. "Penduduk dan Aksesibilitas Kota: Persepektif Tata Ruang Lingkungan". <http://www.worldcat.org>. Diakses tanggal 13 desember 2010.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mardiasmo. 2000. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)*: Vol. 4 No.1

- _____, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- _____, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2, No.1, pp.1-17.
- Mulyana, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2, pp. 65-78.
- Priest, A. N. 1999. User of Local Government Annual Reports: Information Preferences. *Accounting, Accountability and Performance*, Vol. 5, No. 3, pp, 49-62.
- Republik Indonesia. *Kepmendagri No 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____, *Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Daerah*.
- _____, *Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____, *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 27
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rohman, Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa.
- Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002. <http://www.cergas.info>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2010.
- Subaweh, Imam. 2008. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah. <http://www.google.com>. Diakses tanggal 15 Desember 2010.
- Sujana, Edy. 2002. User's of Public Sector Financial Report Perception of Financial Accountability Reporting of Local Government. *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik*, Vol.3. No.1.
- Swadaya, Mandiri. 2008. Membangun sistem Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. <http://www.bpkp.go.id>. Diakses tanggal 15 Desember 2010. 28
- Syafruddin, Muchammad. 2005. Komitmen dan Penggunaan Aparat Pemerintahan Daerah Terhadap Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD): Persepektif Perubahan Paradigma. *Jurnal MAKSI*, Vol. 5, No. 2 pp. 175-193.

Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*, Malang: UMM Press.

Wilson, Earl dan Susan C. Kattelus. 2002. *Accounting for Governmental and Nonprofit Entities*, 13th Edition. Columbia: McGraw-Hill Irwin.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya: Insan Cendekia.